



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG PANDAN
Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,5 Tanjung Pandan
Telepon dan Faksimili: (0719) 22268
Laman : imigrasi.go.id Surel : knm.Tanjungpandan@kemenkumham.go.id

30 Desember 2022

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
Up. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan
di tempat

SURAT - PENGANTAR
Nomor : W.7.IMI.IMI.2-PR.04.04-2655

NO.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Periode Tahun 2022.	Satu berkas	Disampaikan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebelumnya.



Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Suyatno

NIP 197901052006041001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

2022



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN

**Jalan Jenderal Sudirman Km 6.5 Perawas Tanjungpandan
Belitung, 33413
laman: imigrasi.go.id, Email:
kanim.Tanjungpandan@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas nikmat dan karunia Allah SWT atas berkat dan rahmatNya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan dapat melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI- 1597.UM.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024.

Laporan ini disajikan untuk memberi gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan.

Di masa mendatang Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan good governance di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan khususnya dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada umumnya.

Semoga Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbakan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.



Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Suyatno

NIP 197901052006041001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan tahun 2022 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh Direktorat Jenderal Imigrasi selama tahun 2022 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2021 dengan berbagai perbaikan dalam rangka perubahan berkelanjutan guna mendukung pencapaian seluruh visi dan misi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan peta strategis tahun 2020-2024 melalui program Penegakkan dan Pelayanan Hukum dengan 2 Sasaran Program (SS) dan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.CL01 Tahu 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024.

Adapun pada Perjanjian Kinerja tahun 2022, capaian Indikator Kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan adalah:

1. Sasaran Kegiatan meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah, diperoleh hasil realisasi mencapai 4 dari target 3,20 atau sebesar 133%;
2. Sasaran Kegiatan meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah mencapai realisasi 3,90 dari target 3,12 atau sebesar 125%;
3. Sasaran Kegiatan meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah dengan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah diperoleh hasil 3,96 dari target 3,12 atau 127 %.

Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan memperoleh alokasi anggaran senilai Rp. 7.132.787.000,- (Tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) dari anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan Tahun Anggaran 2022 Nomor SD DIPA-013.06.2.109160/2021 tanggal 17 November 2022 yang digunakan sebagai anggaran untuk pelaksanaan program dan seluruh kegiatan yang mendorong tercapainya sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan.

Berdasarkan hasil monitoring realisasi belanja pegawai sampai dengan akhir tahun anggaran TA 2022, anggaran belanja pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan diperkirakan terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp. 293.131.000,- (Dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga dilakukan penambahan pagu anggaran belanja pegawai untuk pemenuhan pagu minus pada satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan, sehingga pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp. 7.425.918.000,- (Tujuh milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).



Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Suyatno

NIP 197901052006041001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari pemerintah, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan wajib melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang pada dokumen Nawacita, RPJPN 2005-2025 dan Misi Presiden. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, unggul dan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM, Pasal 1 ayat (1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beradadi bawahdan bertanggung jawab kepada Presiden, Pasal 2 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, serta berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Pasal (1) berbunyi bahwa Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut dengan Kanim adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan kabupaten Belitung berdiri pada tahun 1986 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.05. PR.07.04 Tahun 1986 dan pada saat itu masih sebagai Kantor Imigrasi Kelas III Tanjungpandan. Kantor ini pada awal aktivitasnya menempati gedung bekas Pos Imigrasi yang sebelumnya bagian dari Kantor Imigrasi Kelas II Pangkal Pinang yang terletak di Jalan Manggar (saat ini menjadi Jalan Jenderal Sudirman km 6,5 Perawas, Tanjungpandan Belitung) dan mulai aktif melayani masyarakat pada tanggal 22 Maret 1987. Pada tanggal 30 Agustus 1989 Kantor Imigrasi Kelas III Tanjungpandan menempati gedung baru yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman km 6,5 Perawas Tanjungpandan dengan luas areal 3798m² dan luas bangunan 400m² yang terdiri dari dua lantai. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04 Tahun 2006, Kantor Imigrasi Kelas III Tanjungpandan naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungpandan pada tahun 2006.

Pada tahun anggaran 2016, adanya pekerjaan renovasi atap bangunan bertingkat dan penambahan gedung ruang pelayanan keimigrasian dengan luas bangunan 136 m² yang terdiri dari satu lantai. Pada tahun 2018, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan menerima hibah berupa bangunan Mushola An NurQodriawan guna menunjang fasilitas kegiatan ibadah umat muslim. Pada tanggal 10 Juni 2019 dilaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Renovasi Gedung Kantor Bertingkat Interior dan Eksterior dengan anggaran APBN 2019 senilai Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) selama 180 hari pelaksanaan.

Secara geografis wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan terdiri dari dua Kabupaten yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Kabupaten Belitung terletak antara 107008'BT sampai 107058'BT dan 02030'LS sampai 03015LS dengan luas seluruhnya 229.369 Ha atau kurang lebih 2.293.69 km², dan memiliki letak geografis yang strategis dan berada di alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), sedangkan Kabupaten Belitung Timur terletak antara 107o45'BT sampai 108o18'BT dan 02o30'LS sampai 03o15'LS dengan luas daratan mencapai 250.691 Ha atau kurang lebih 2.506,91 km². Posisinya juga berada dekat dengan jalur perdagangan pelayaran Internasional. Pulau Belitung memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi ke Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Singapura. Pada peta dunia Pulau Belitung dikenal dengan nama BILLITONT yang bergaris tengah Barat ±79 km dan garis tengah Utara-Selatan ±77 km, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Pulau Belitung yang berada dalam wilayah Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki karakteristik wilayah kepulauan, kurang lebih yang terdiri dari 100 buah pulau besar dan kecil yang juga termasuk kedalam wilayah administratif Kabupaten Belitung. Luas seluruh wilayah pulau-pulau kecil tersebut sekitar 22.000 Ha. Kabupaten Belitung beribukota Tanjungpandan dan terdiri dari 5 kecamatan, 42 desa, 7 kelurahan, 314 Rukun Warga dan 863 Rukun Tetangga. Kelima kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Tanjungpandan;
2. Kecamatan Membalong;
3. Kecamatan Selat Nasik;
4. Kecamatan Sijuk;
5. Kecamatan Badau.

Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan, adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Manggar;
2. Kecamatan Gantung;
3. Kecamatan Kelapa Kampit;
4. Kecamatan Dendang;
5. Kecamatan Simpang Pesak;
6. Kecamatan Simpang Renggang;
7. Kecamatan Damar.

Dalam melaksanakan tugas, Kanim mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya.

Adapun fungsi dari Kanim adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
- b. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
- c. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
- d. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan statusKeimigrasian;
- e. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijenkeimigrasian;
- f. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
- g. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasikeimigrasian;
- h. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
- i. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang miliknegara, dan rumah tangga; dan
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Tahun 2022 berusaha melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM RI dalam mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan secara administrasi dan fasilitatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung melalui Kepala Divisi Keimigrasian.

Secara Keseluruhan jumlah pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pejabat Struktural status Pejabat Imigrasi : 9 orang
2. Jumlah Pejabat Struktural status non Pejabat Imigrasi : 3 orang
3. Jumlah Pejabat Imigrasi sebagai Fungsional Umum : -
4. Jumlah Pegawai sebagai Jabatan Fungsional Umum : 7 orang
5. Jumlah Pegawai sebagai Jabatan Fungsional Tertentu : 18 orang
6. Jumlah CPNS : 1 orang

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Imigrasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kanim Kelas II TPI terdiri atas:

- A. Subbagian Tata Usaha;
- B. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
- C. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian; dan
- D. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana

program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Adapun tugas dari Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

1. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
2. pelaksanaan dan pengendalian internal;
3. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
4. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a) Urusan Kepegawaian;
- b) Urusan Keuangan; dan
- c) Urusan Umum.

Uraian tugas dari masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

- a) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaansumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal;
- b) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaanurusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi danpelaporan;
- c) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barangmilik negara dan rumah tangga.

2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
- b. pelayanan paspor;
- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. pelayanan pas lintas batas;
- e. pelayanan izin tinggal;
- f. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- g. pelayanan izin masuk kembali;
- h. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- i. pelayanan surat keterangan keimigrasian;
- j. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
- k. pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
- l. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- m. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian; dan
- b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian.

Tugas dari masing-masing Subseksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian adalah sebagai berikut:

- a. Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar;
- b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.

3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

Dalam melakukan tugas, Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. Pemeliharaan dan pengamanan system teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama antar instansi.

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan
- b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Tugas dari masing-masing Subseksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian adalah sebagai berikut:

- a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerja sama antar instansi.

4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

Dalam melakukan tugas, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan Keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen Keimigrasian; dan
- b. Subseksi Penindakan Keimigrasian.

Tugas dari masing-masing Subseksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian adalah sebagai berikut:

- a. Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- b. Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

STRUKTUR ORGANISASI



C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan bagi Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyusun laporan kinerja;
- b. Terdapat keseragaman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Untuk memantau keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Aspek Strategis

Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kantor Imigrasi menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian, pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan, pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian, pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian, pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian, pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian, pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian, pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian, pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM selama tahun 2022, terdapat beberapa tantangan yang dialami antara lain :

1. Terdapat pagu minus belanja pegawai yang akan mempengaruhi nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran);
2. Penegakan Hukum pada kegiatan Tindakan Administrasi Keimigrasian tidak terserap maksimal dikarenakan tidak adanya pelanggaran Orang Asing yang melakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian;
3. Pemeriksaan TPI tidak terserap maksimal disebabkan frekuensi kedatangan alat angkut belum maksimal sehingga anggaran tidak bisa terserap;
4. Proses Revisi DIPA merupakan salah satu hambatan dalam penyerapan dana APBN karena lamanya waktu dalam penyelesaian Revisi DIPA di tingkat eselon I.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan latar belakang disusunnya laporan, penjelasan umum organisasi seperti tugas, fungsi dan struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan, maksud dan tujuan penyajian laporan, Isu strategis, serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja Dan Perjanjian Kinerja
Dalam bab ini menguraikan ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) pembahasan pada bab ini antara lain rencana strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini;
 - c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - B. Realisasi Anggaran
Pada sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.
 - C. Capaian Kinerja Anggaran
Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari nilai kinerja pada Aplikasi SMART DJA dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA.
 - D. Capaian Kinerja Lainnya
 - a. E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/ sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Pelaporan kinerja melalui aplikasi E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - b. Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAK Asasi Manusia
Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. e-Monev BAPPENAS
Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian/ lembaga). Lebih lanjut lagi, aplikasi *e-Monev* juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui *output-output* prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga.

Aplikasi *e-Monev* dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Bab IV Penutup

A. Kesimpulan

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung.

B. saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi

Lampiran-lampiran

Perjanjian Kinerja Tahun 2022;

Perjanjian kinerja tahun yang akan datang.

BAB II PERENCANAAN KERJA

A. Rencana Strategis

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RFJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang terang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia dirancang untuk se mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Program imigrasi yang tercantum dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi 2015-2019 adalah "Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian yang mencerminkan prioritas organisasi pada 5 Qu) tahun berlalu yakni pada upaya untuk meningkatkan pelayanan kemigrasian terintegrasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dan Penegakan Hukum Keimigrasian melaka penindakan keimigrasian hak Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) maupun projustisia.

Untuk perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian, Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan I (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon I dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan Tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen, Program "Penegakan dan Pelayanan Hukum yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasaryakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang diuraikan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Tahun 2022 dengan program Pelayanan Eazy Paspor dan Penegakan Hukum Keimigrasian. Perjanjian kinerja dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		4. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.003.023.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.003.023.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.129.764.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 5.129.764.000

TABEL PERJANJIAN KINERJA 2021
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memastikan pelayanan public dbidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum	3,15
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	82,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	88,0

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	3,15
2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
3	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT	Persentase satuan kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	92%
		Persentase satuan kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	3,15
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11
		Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 2.003.023.000,00
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 2.003.023.000,00
Program Dukungan Manajemen	Rp 5.129.764.000,00
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 5.129.764.000,00

BAB III AKUNTABILITAS

A. CAPAIAN KINERJA

Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum, Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Kepastian hukum dapat dicapai melalui peraturan perundang undangan yang jelas, tegas dan konsisten. Pada saat ini masih terdapat substansi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan Hal ini mengakibatkan kurang sempurnanya kualitas peraturan perundang-undangan yang berdampak meningkatnya jumlah revisi suatu peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk amandemen maupun melalui pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Kualitas peraturan perundang-undangan ditentukan antara lain oleh dukungan pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademik.

Capaian kinerja untuk laporan kinerja Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjung Pandan Tahun Anggaran 2022 ini dihitung berdasarkan target pada perjanjian kinerja tahun 2022 dan Realisasi fisik nya yang bisa dicapai pada tahun anggaran 2022.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan antara tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

Tahun 2021				Tahun 2022			
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15 Indeks	3,98	126%	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks	4	133%
2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11 Indeks	3,91	126%	2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks	3,90	125%
3. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11 Indeks	3,98	128%	3. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks	3,96	127%

Sasaran I

Sasaran kegiatan yang pertama adalah Meningkatnya kualitas pelayanan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan untuk pencapaian target kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan. Indikator yang pertama adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah dan yang kedua adalah Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah.

1. Capaian Per Indikator Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks	4	133%

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah pada Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan tahun 2022 ini mencapai nilai indeks 4 dengan target capaian sebesar 3.20 (indeks) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk capaian target selama satu tahun dapat dihitung dengan menggunakan rumus capaian sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Target}$$

Berdasarkan rumus penghitungan capaian di atas didapatkan hasil sebagai berikut:

$$\frac{4}{3,20} \times 100\% = 133\%$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Keimigrasian dilaksanakan melalui aplikasi survei secara real time oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM selama tahun 2022 melalui laman <https://survei.balibangham.go.id> dengan berpedoman pada instrumen sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian pada tahun 2022 melewati target (100%) yakni mencapai 133 %, jika dikonversi ke skala 4 diperoleh realisasi 4. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI

Tanjungpandan **sangat baik**. Nilai IKM Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan tahun 2022 dengan kategori "**sangat baik**". Artinya kualitas layanan publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat puas terhadap kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan.

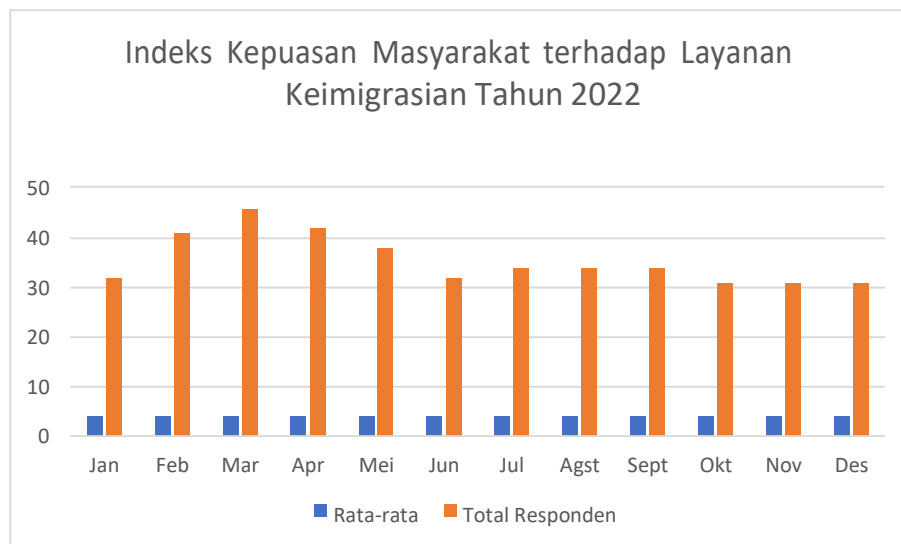
Obyek dari kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) unsur kepuasan masyarakat yang ada pada pelayanan, yaitu:

1. Informasi pelayanan tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik;
2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini;
3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan mudah dikuti/dilakukan;
4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan;
5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan;
6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan memberikan kenyamanan/mudah digunakan;
7. Respon Petugas pelayanan/ sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan dengan cepat;
8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan mudah digunakan/diakses.

Pencapaian hasil survei tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap beberapa layanan publik Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu Layanan Paspor berupa sosialisasi dan implementasi Mobile Paspor, Pengembangan SIMKIM, Layanan Easy Passport.

Berikut data survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian selama tahun 2022.

Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Informasi	4	4	3,97	3,99	3,98	4	4	4	4	4	4	4
Persyaratan	4	4	4	3,99	4	3,98	3,98	4	4	4	4	4
Prosedur/Alur	4	4	4	3,99	4	4	4	4	4	4	4	4
Jangka waktu	4	3,99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Tarif/Biaya	4	4	4	3,99	4	4	4	3,98	4	4	4	4
Sarana prasarana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Respon Petugas	4	4	4	3,99	4	4	4	4	4	4	4	4
Layanan konsultasi	4	3,99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rata-rata	4	4	3,99	3,99	3,99	4	3,99	3,99	4	4	4	4
Total Responden	32	41	46	42	38	32	34	34	34	31	31	31



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa perolehan skor dari masing-masing unsur pada tahun 2022, unsur Informasi, Persyaratan, dan Tarif/biaya memiliki nilai masih sangat baik yakni 3,99 dari nilai indeks 4. Hal ini bukan merupakan hal yang dikhawatirkan namun tetap menjadi sangat perhatian bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap unsur-unsur dimaksud, baik itu berupa penguatan, pembinaan maupun pendampingan. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, 3 (tiga) unsur kepuasan masyarakat yang dinilai perlu mendapatkan penguatan. Oleh karena itu direkomendasikan untuk:

1. Memastikan segala unsur informasi, persyaratan dan tarif/biaya sesuai dengan ketentuan dimana pengguna menerima produk/jasa layanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
2. Secara aktif menyediakan informasi terkait layanan atau kegiatan unit pada media sosial;
3. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan service excellent (pelayanan prima).

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Tahun 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,98	126%	3,20	4	133%



Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021 dan 2022, bisa dilihat realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan tahun 2021 sebesar 3,98 (indeks) dan realisasi indeks kepuasan pada tahun 2022 sebesar 4 (indeks). Pencapaian realisasi tahun 2022 ini mengalami kenaikan dari pencapaian realisasi di tahun 2021.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah dalam Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.15	3.20	3.25	3.30

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah tahun 2021 adalah 3.15 (indeks) sementara target di tahun 2022 adalah 3.20 indeks. Realisasi tahun 2021 adalah 3.98 (indeks) kemudian pencapaian realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar sebesar 4 (indeks). Pencapaian Realisasi Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan pada tahun 2021 dan 2022 melebihi target Jangka Menengah dalam Renstra.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

5. Hambatan dan Penyebab Keberhasilan

Terlampauinya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Implementasi layanan Eazy Passport yaitu program pelayanan paspor secara

kolektif yang dilaksanakan di luar kantor imigrasi, yakni di lokasi pemohon layanan menggunakan unit passport mobile di wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur;

- Banyaknya inovasi terkait layanan keimigrasian yang dibuat oleh kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan;
- Bertambahnya petugas layanan yang mengikuti pelatihan budaya pelayanan prima dan paham tentang sistem layanan berbasis teknologi;
- Optimalnya penyebaran informasi melalui Papan Iklan Billboard, banner, media sosial, website, cetak, dan elektronik terkait pelayanan keimigrasian;
- Pemberian reward dan punishment terhadap pegawai, sehingga petugas dituntut untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pemohon.

Sasaran II

Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

1. Capaian Per Indikator Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3,12 Indeks	3,90	125%

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa nilai indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan tahun 2022 ini mencapai nilai indeks 3,90 dengan target capaian sebesar 3.12 (indeks) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk capaian target selama satu tahun dapat dihitung dengan menggunakan rumus capaian sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Target}$$

Berdasarkan rumus penghitungan capaian di atas didapatkan hasil sebagai berikut:

$$\frac{3,90}{3,12} \times 100\% = 125\%$$

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik

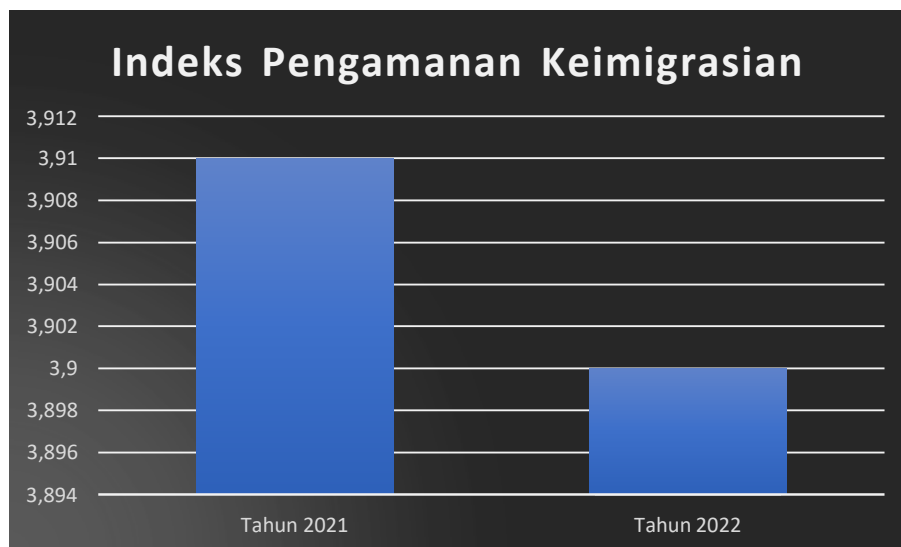
Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI. Tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian diantaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan pada tahun 2022 diperoleh dari hasil survei yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui e-Form mulai dari tanggal 14 November hingga 25 Desember 2022 yang diakses melalui <https://bit.ly/RekapitulasiCapaianPK2022>.

Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan pada tahun 2022 yakni mencapai 125 %, jika dikonversi ke skala 4 diperoleh realisasi 3,90. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Indeks Pengamanan Keimigrasian Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan **sangat baik**.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Tahun 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,91	126%	3,12	3,90	125%



Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021 dan 2022, bisa dilihat realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan tahun 2021 sebesar 3,91 (indeks) dan realisasi pada tahun 2022

sebesar 3,90 (indeks). Pencapaian realisasi tahun 2022 ini mengalami penurunan dari pencapaian pencapaian realisasi di tahun 2021, namun masih dalam kategori “**Sangat Baik**”.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3.11	3.12	3.13	3.14

Melihat realisasi pencapaian target indeks pengamanan keimigrasian di wilayah pada tahun 2022 dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui target dikarenakan pencapaian di tahun 2022 sudah sebesar 3,90 (indeks), dengan capaian 125%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Standar Nasional

Perbandingan dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena Indeks Pengamanan Keimigrasian hanya dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun untuk satuan kerja imigrasi dapat mengacu nilai capaian indeks pengamanan keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai standar nasional. Kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

5. Hambatan dan Penyebab Keberhasilan

Survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan yang melampaui target dari 3,12 dengan nilai 3,90 disebabkan:

1. Pemetaan WNA dan laporan harian intelijen sudah dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur;
2. Terjalannya kerja sama pihak penegak hukum, Pemilik Pariwisata seperti Hotel, cafe dan lain-lain yang secara aktif melaporkan keberadaan orang asing di wilayahnya ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sehingga keberadaan dan kegiatan orang asing dapat dipantau dan diawasi;
3. Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses secara mudah seperti aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) dan aplikasi Nyidakim sebagai informasi keberadaan dan kegiatan termasuk pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing;
4. Kegiatan TimPORA dalam hal pengawasan keimigrasian yang sudah dibentuk baik di kabupaten Belitung dan Belitung Timur baik yang operasi mandiri ataupun gabungan telah berjalan dengan baik;
5. Respon terhadap pengaduan terkait penegakan hukum keimigrasian segera ditindaklanjuti.

Sasaran III

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI.

Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

1. Capaian Per Indikator Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di wilayah	Indeks Kepuasan Internal di wilayah	3,12 Indeks	3,96	127%

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa nilai Indeks Kepuasan Internal di wilayah pada Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan tahun 2022 ini mencapai nilai indeks 3,96 dengan target capaian sebesar 3.12 (indeks) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk capaian target selama satu tahun dapat dihitung dengan menggunakan rumus capaian sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Target}$$

Berdasarkan rumus penghitungan capaian di atas didapatkan hasil sebagai berikut:

$$\frac{3,96}{3,12} \times 100\% = 127\%$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah juga dilaksanakan melalui aplikasi survei secara real time oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM selama tahun 2022 melalui laman [hips://survei.balibangham.go.id](https://survei.balibangham.go.id).

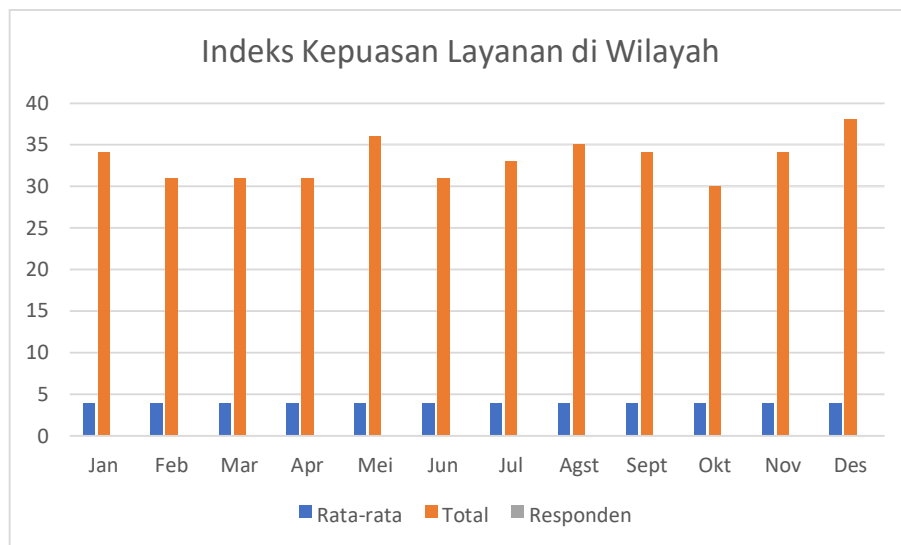
Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah pada tahun 2022 melewati target (100%) yakni mencapai 127 %, jika dikonversi ke skala 4 diperoleh realisasi 3,96. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Indeks Kepuasan Internal di Wilayah pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan “sangat baik.”

Obyek dari kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) unsur kepuasan Internal di wilayah, yaitu

1. Transparansi
2. Menerima Imbalan
3. Perlakuan yang sama
4. Prosedur
5. Privasi Pelapor
6. Proses Pelanggaran
7. Pencegahan Korupsi

Berikut data survei Indeks Kepuasan Internal di wilayah selama tahun 2022.

Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Transparansi	3,94	3,93	3,97	3,97	3,98	3,93	3,97	3,90	3,96	3,97	3,94	3,96
Menerima Imbalan	3,86	3,93	3,97	4	3,98	3,93	3,97	3,90	3,96	3,97	3,94	3,96
Perlakuan yang sama	3,94	4	3,97	3,97	3,98	3,93	3,97	3,90	3,96	3,97	3,94	3,96
Prosedur	3,86	3,95	3,97	4	4	3,93	3,97	3,90	3,96	3,97	3,94	3,96
Privasi Pelapor	3,94	3,95	3,97	3,97	4	3,95	3,97	3,90	3,96	3,97	3,94	3,96
Proses Pelanggaran	3,94	3,95	3,97	4	4	3,93	3,97	3,90	3,96	3,97	3,94	3,96
Pencegahan Korupsi	3,94	3,95	3,97	3,97	3,98	3,93	3,97	3,90	3,96	4	3,94	3,96
Rata-rata	3,91	3,95	3,97	3,98	3,98	3,93	3,97	3,9	3,96	3,97	3,94	3,96
Total Responden	34	31	31	31	36	31	33	35	34	30	34	38



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa perolehan skor dari masing-masing unsur pada tahun 2022, ketujuh unsur memiliki nilai masih sangat baik yakni 3,9 dari nilai indeks 4. Meskipun tidak mencapai nilai indeks 4, namun tetap menjadi perhatian agar melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pimpinan selaku role model melakukan penerapan kinerja yang baik serta melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota;
2. Terciptanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pimpinan dengan bawahannya;
3. Agar satker melakukan manajemen perubahan dalam meningkatkan kinerja pelayanan;
4. Agar menerapkan perilaku kinerja yang baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, baik dari peningkatan kualitas SDM, Pengetahuan terkait pengembangan kompetensi pegawai maupun pengelolaan Anggaran yang baik.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Semester I Tahun 2023

dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Internal di wilayah	3,11	3,98	128%	3,12	3,96	127%



Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021 dan 2022, bisa dilihat realisasi Indeks Kepuasan Internal di wilayah di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan tahun 2021 sebesar 3,98 (indeks) dan realisasi indeks kepuasan pada tahun 2022 sebesar 3,96 (indeks). Pencapaian realisasi tahun 2022 ini mengalami penurunan dari pencapaian realisasi di tahun 2021 namun masih dengan kategori “sangat baik”.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3.11	3.12	3.13	3.14

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Internal di wilayah tahun 2021 adalah 3,11 indeks sementara target di tahun 2022 adalah 3,12 indeks. Realisasi pencapaian indeks kepuasan internal Tahun 2021 sebesar 3,98 (indeks), dan tahun 2022 sebesar 3,96 (indeks).

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian

Hukum dan HAM.

5. Hambatan dan Penyebab Keberhasilan

Stabilnya nilai Indeks Kepuasan Internal di wilayah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Kematangan pegawai dalam mengimplementasikan layanan sesuai dengan SOP;
- Kematangan pegawai dalam pengelolaan Jaringan dan perangkat Teknologi Informasi;
- Kematangan pegawai dalam penggunaan Aplikasi;
- Kematangan pegawai dalam manajemen perubahan di Kanim Tanjungpandan;
- Kematangan pegawai dalam memaksimalkan potensi Sumber Daya Manusia;
- Kematangan pegawai dalam integritas dan pelaksanaan anggaran;
- Kematangan pegawai dalam meningkatkan integritas kerja dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma.

B. REALISASI ANGGARAN

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan untuk Tahun Anggaran 2022 memperoleh total pagu anggaran sebesar Rp. 7.132.787.000,- (Tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) di bulan Desember Tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan **mendapat penambahan anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 293.131.000,- (Dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)**, sehingga pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp. 7.425.918.000,- (Tujuh milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).

Semua kegiatan tersebut telah memiliki alokasi pos-pos pengeluaran dan telah dilakukan Revisi Anggaran masing-masing TUPOKSI yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik kepada Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Publik kepada Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan TA 2022 telah dialokasikan dana anggaran dan telah dilakukan Revisi yang *semula* anggaran sebesar Rp. 550.285.000,- (lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) *menjadi* anggaran sebesar Rp. 264.285.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan sasaran kegiatannya adalah Layanan Penerbitan Paspor, Penerbitan Dokumen Keimigrasian RI di Unit Layanan Keimigrasian, Penyelenggaraan Unit Layanan Keimigrasian, Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, dan Layanan Penerbitan Izin Tinggal.

Pengukuran Capaian Kinerja Pelayanan Publik kepada Masyarakat:

Anggaran : Rp. 264.285.000,-

Realisasi : Rp. 261.138.174,-

Capaian : Rp. 261.138.174,-/ Rp. 264.285.000,- x 100% = 98,81%

2. Operasi Bidang Keamanan

Kegiatan Operasi Bidang Keamanan telah dialokasikan jumlah dana sebesar Rp. 384.470.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pos-pos alokasi, diantaranya: Penyelidikan Intelijen keimigrasian

di Wilayah, Operasi Mandiri di Wilayah, Operasi Gabungan di Wilayah, dan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah.

Pengukuran Capaian Kinerja Operasi Bidang Keamanan:

Anggaran : Rp. 384.470.000,-

Realisasi : Rp. 383.840.000,-

Capaian : Rp. 383.840.000,-/ Rp. 381.470.000,- x 100% = 99,84%

3. Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat

Dalam mendukung kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat telah dialokasikan jumlah dana sebesar Rp. 678.844.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan pos-pos alokasi, diantaranya: Tindakan Administratif Keimigrasian, dan Pemeriksaan Keimigrasian di TPI. Anggaran Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat telah direvisi pada TUPOKSI menjadi Rp. 584.844.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pengukuran Capaian Kinerja Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat :

Anggaran : Rp. 584.844.000,-

Realisasi : Rp. 583.617.917,-

Capaian : Rp. 583.617.917,-/ Rp. 584.844.000,- x 100% = 99,79%

4. Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat

Kegiatan Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat di Wilayah pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan TA 2022 telah dialokasikan dana anggaran sebesar Rp. 389.424.000,00 (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan telah dilakukan Revisi sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 310.824.000,- (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) adapun sasaran kegiatan dari Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat adalah Pengawasan Orang Asing melalui kegiatan TIMPORA dan Pemeriksaan Keimigrasian di atas Alat Angkut seperti pemeriksaan Crew Kapal dan penumpang pesawat.

Pengukuran Capaian Kinerja Pengawasan Keimigrasian:

Anggaran : Rp. 310.824.000,-

Realisasi : Rp. 308.959.894,-

Capaian : Rp. 310.824.000,- / Rp. 308.958.894,- x 100% = 99,40 %

5. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Kegiatan pada Layanan Dukungan Manajemen Internal adalah Layanan Perkantoran terdiri dari Pembayaran Gaji dan Tunjangan; dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Jumlah dana yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.742.013.000,00 (empat milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga belas ribu rupiah). Anggaran Layanan Dukungan Manajemen Internal merupakan Layanan Perkantoran yang anggarannya bersumber dari Rupiah Murni (RM) di peruntukan untuk keperluan Gaji dan Tunjangan pegawai serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor yaitu Belanja Operasional perkantoran, pembayaran langganan daya dan jasa, pengadaan pakaian dinas dan seragam, pemeliharaan Gedung dan bangunan, pemeliharaan perlengkapan dan sarana perkantoran, pemeliharaan kendaraan dinas, honorarium pengelola keuangan dan sewa kendaraan operasional

Pengukuran Capaian Kinerja Layanan Perkantoran :

Anggaran : Rp. 4.742.013.000,-
Realisasi : Rp. 4.714.858.890,-
Capaian : Rp. 4.742.858.890,-/ Rp. 4.742.012.000,-x 100% = 99,43 %

6. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal telah dialokasikan dana sejumlah Rp. 306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) dengan kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran. Anggaran Layanan Sarana dan Prasarana direvisi sehingga menjadi anggaran sebesar Rp.825.400.000,- untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa pengadaan Unit Power Suplay, LCD Projector/Infocus, Scanner, PC Unit, Laptop dan Televisi. Pengadaan Kendaraan Bermotor berupa pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan untuk pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa pengadaan Sice, Tangki Air, Mimbar dan AC Split.

Pengukuran Capaian Kinerja Layanan Sarana dan Prasarana Internal:

Anggaran : Rp. 825.400.000,-
Realisasi : Rp. 821.467.000,-
Capaian : Rp. 821.467.000,-/Rp. 825.400.000,-x 100% = 99,52%

7. Layanan Manajemen SDM Internal

Kegiatan Layanan SDM telah dialokasikan dana sejumlah Rp. 129.224.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan kegiatan Layanan Manajemen Kepegawaian anggaran direvisi untuk kegiatan TUPOKSI menjadi Rp. 164.396.000.(seratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Adapun anggaran yang dialokasikan untuk keperluan Pelantikan/Sumpah Jabatan, Pemeriksaan kesehatan pegawai/medical cekup serta belanja perjalanan dinas keluar kota.

Pengukuran Capaian Kinerja Layanan SDM:

Anggaran : Rp. 164.396.000,-
Realisasi : Rp. 164.124.686,-
Capaian : Rp. 164.124.686,-/Rp. 164.396.000,-x 100% = 99,83%

8. Layanan Manajemen Kinerja Internal

Kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal telah dialokasikan dana sejumlah Rp. 149.686.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah),dengan kegiatan :

- a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran;
- b. Layanan Manajemen Keuangan dan
- c. Layanan Reformasi Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja Layanan Manajemen Kinerja:

Anggaran : Rp. 149.686.000,-
Realisasi : Rp. 148.331.510,-
Capaian : Rp. 148.331.510,-/Rp. 149.686.000,-x 100% = 99,10%

Detail capaian realisasi kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagaimana laporan Realisasi Pagu Dana Per Output Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Laporan Pagu dana Per Output
Per 31 Desember 2022

Nama Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1.544.423.000	1.537.555.985	99,56%
Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	264.685.000	261.138.174	98,81%
Operasi Bidang Keamanan	384.470.000	383.840.000	99,84%
Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	584.844.000	583.617.917	99,79%
Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	310.824.000	308.959.894	99,40%
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	5.881.495.000	5.848.782.086	99,44%
Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.742.013.000	4.714.858.890	99,43%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	825.400.000	821.467.000	99,52%
Layanan Manajemen SDM Internal	164.396.000	164.124.686	99,83%
Layanan Manajemen Kinerja Internal	149.686.000	148.331.510	99,10%
Jumlah :	7.425.918.000	7.386.338.071	99,47%

Laporan Pagu Dana Per Sumber Dana sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tersaji dalam tabel berikut ini:

Laporan Pagu dana Per Sumber Dana
Per 31 Desember 2022

Nama Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
RUPIAH MURNI (RM)	3.682.597.000	3.657.036.229	99,31%
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)	3.743.321.000	3.729.301.842	99,63%
Jumlah :	7.425.918.000	7.386.338.071	99,47%

Laporan Pagu Dana Per Jenis Belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tersaji dalam tabel berikut ini:

Laporan Pagu dana Per Jenis Belanja
Per 31 Desember 2022

No	Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	BELANJA PEGAWAI	2.259.267.000	2.237.039.856	99,02%

2	BELANJA BARANG	4.327.831.215	4.327.831.215	99,69%
3	BELANJA MODAL	825.400.000	821.467.000	99,52%
Jumlah :		7.425.918.000	7.386.338.071	99,47%

Penggunaan Pagu Anggaran Tahun 2022 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 telah dilaksanakan dengan sangat baik, terlihat dari penyerapan dari jumlah pagu anggaran setelah Revisi anggaran sebesar Rp. 7.425.918.000,- (tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) telah berhasil direalisasikan/penyerapan sampai akhir tahun Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 7.386.338.071,- (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh satu rupiah) atau 99,47%.

Sebagai perbandingan berikut capaian Realisasi Anggaran Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2021 yaitu:

Tabel realisasi Anggaran Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN		PAGU ANGGARAN {Rp}	REALISASI {Rp}	SISA ANGGARAN {Rp}	CAPAIAN {%}
1	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	PNBP	1,723,307,000	1,022,443,277	700,863,723	59.33%
2	Koordinasi	PNBP	161,340,000	107,180,676	54,159,324	66.43%
3	Pelayanan Publik kepada masyarakat	PNBP	703,369,000	327,955,197	375,413,803	46.63%
4	Operasi Bidang Keamanan	PNBP	390,270,000	321,164,284	69,105,716	82.29%
5	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	PNBP	468,328,000	266,143,120	202,184,880	56.83%
6	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	PNBP	4,378,361,000	4,016,118,989	362,242,011	91.73%
7	Layanan Perkantoran	RM	3,288,611,000	3,118,584,843	170,026,157	94.83%
8	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	PNBP	88,850,000	38,493,481	50,356,519	43.32%
9	Layanan Umum	PNBP	313,746,000	246,204,870	67,541,130	78.47%
10	Layanan Sarana Internal	PNBP	545,216,000	519,926,000	25,290,000	95.36%
11	Layanan SDM	PNBP	95,214,000	78,838,795	16,375,205	82.80%
12	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	PNBP	46,000,000	14,071,000	31,929,000	30.59%

13	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	PNBP	724,000	0	724,000	0.00%
Jumlah			6,101,668,000	5,038,562,266	1,063,105,734	82.58%

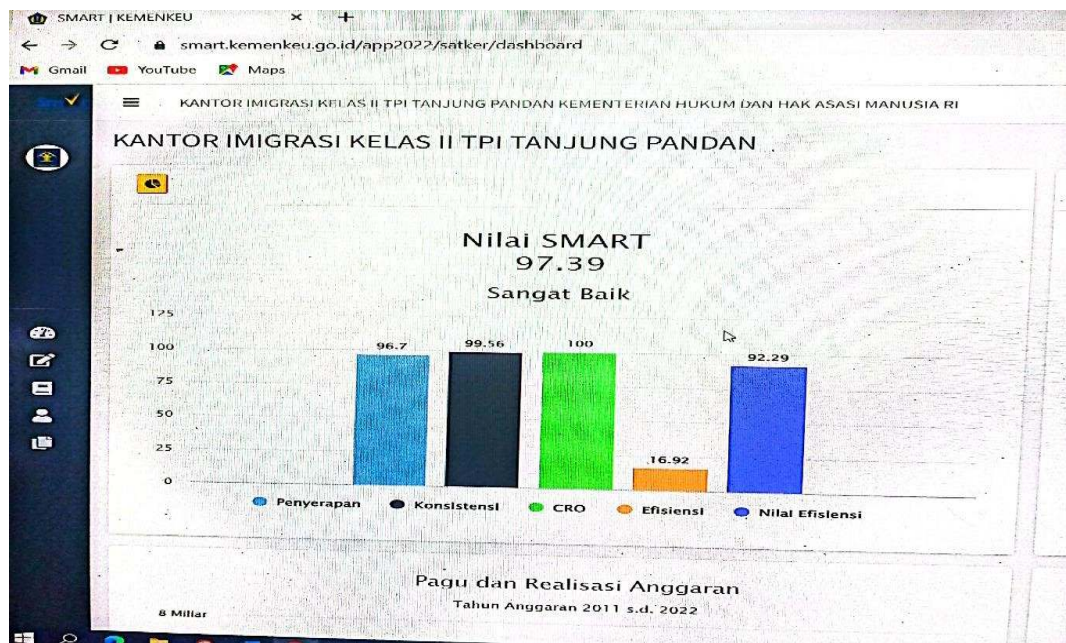
Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat peningkatan capaian realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sebesar 16,89 %. Pada tahun 2021 capaian sebesar 82,58 % kemudian naik menjadi 99,47 di tahun 2022.

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan telah menggunakan Aplikasi SMART dari Kementerian Keuangan yang merupakan Aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan menginput capaian kinerja pada Aplikasi SMART DJA. Adapun nilai Kinerja SMART pada Kantpr imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan yaitu sebesar 97,39%

Grafik Nilai SMART Per 31 Desember 2022 :



2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas kinerja Pelaksanaan Anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Nilai IKPA pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 96,33%, sudah melebihi target Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar 95,00%. Hal ini disebabkan oleh 8 (delapan) Indikator yaitu :

1. Revisi DIPA dengan nilai 100 dengan bobot 10;

kinerja unit kerja.

Dari tabel tersebut diatas diketahui capaian perjanjian kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan tahun 2022 dengan 3 indikator kinerja melebihi target (>100 %).

Di tahun anggaran 2022 ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan mempunyai 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang akan dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi dengan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2 (dua) Sasaran Strategis yang harus dipenuhi yaitu Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah dan Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah. Sedangkan indikatornya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keimigrasian, Indeks Pengamanan Keimigrasian dan Indeks Kepuasan Internal di wilayah. Setiap indikator memiliki target pencapaian dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keimigrasian memiliki target pencapaian sebesar 133 %, Indeks Pengamanan Keimigrasian sebesar 125 % dan Indeks Kepuasan Internal di wilayah sebesar 127 %. Tahun 2022 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan telah diisi pencapaiannya di tiap bulannya dan diisi berdasarkan survei dari Balitbangham (survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi). Hasil nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah diambil berdasarkan hasil pengukuran Indeks Capaian Perjanjian Kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang hasil indeks pencapaiannya didapatkan di akhir tahun 2022. Indikator yang ketiga adalah Indeks Kepuasan Internal di wilayah yang hasil capaiannya didapatkan dari hasil survei Balitbangham yang dilaksanakan rutin di setiap bulan.

2) Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

- a) Tersedianya data cekal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan dan terselenggaranya pengusulan yang cepat, tepat dan berbasis IT

Detail Capaian

Periode	Target Pencapaian	Capaian	Keterangan	Data Pendukung	Status
T22-B02	Uji Coba Aplikasi Cekal Online di satuan kerja	100	Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> LAPORAN_LUICOBAL_CEKAL_DIVIM.pdf 	Terverifikasi
T22-B05	Tersedianya data cekal di UPT	100	Keterangan Verifikator : daduk lengkap	<ul style="list-style-type: none"> LAPORAN SOSIALISASI CEKAL ONLINE 20-22 APRIL 2022 oleh Divisi Keimigrasian.pdf 	Terverifikasi
T22-B08	Tersedianya data cekal di UPT	100	Keterangan Verifikator : data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Monitoring Database Aplikasi Cekal Online Kanim Tanjungpandan Periode Januari s.d Agustus 2022.pdf 	Terverifikasi

b) Penegakan hukum berbasis SOPAP dan Regulasi Detail Capaian

Periode	Target Pencapaian	Capaian	Keterangan	Data Pendukung	Status
T22-B02	Uji coba SOPAP penegakan hukum keimigrasian di UPT	100	Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> LAPORAN_SOSIALISASI_SOPAP_DIVIM.pdf b. Dokumen implementasi penegakan hukum 	Terverifikasi
T22-B05	1. Penerapan SOPAP 2. Database Penegakan Hukum	100	Keterangan Verifikator : daduk lengkap	<ul style="list-style-type: none"> DAFTAR INVENTARISASI PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM BERBASIS APLIKASI KANIM PANGKALPINANG.pdf 	Terverifikasi
T22-B08	1. Penerapan SOPAP 2. Database Penegakan Hukum	100	Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap dan sesuai	<ul style="list-style-type: none"> Lap Rekapitulasi TAK dan Projustisia Kanim Tanjungpandan Periode Januari s.d Agustus 2022.pdf 	Terverifikasi

c) Implementasi Mobile Paspor

Detail Capaian

Periode	Target Pencapaian	Capaian	Keterangan	Data Pendukung	Status
T22-B02	1. Penyusunan rencana kegiatan, 2. Sosialisasi layanan Mobile Paspor ke masyarakat, instansi pemerintah/BUMN /swasta/ komunitas	100	Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> rapat rencana kegiatan.pdf 	Terverifikasi
T22-B05	1. Melakukan sosialisasi layanan Mobile Paspor, 2. Melaksanakan Mobile Paspor	100	Keterangan User : Laporan Layanan Mobile Paspor Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> sosialisasi m Laporan B05 Sosialisasi M Paspor.pdf 	Terverifikasi
T22-B08	1. Melaksanakan kegiatan Mobile Paspor, 2. Melakukan monitoring kepada Unit Pelaksana Teknis implementasi Mobile Paspor	100	Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> B08 Implementasi Mobile Paspor.pdf 	Terverifikasi

Dari Target pencapaian yang ditetapkan oleh kementerian hukum dan HAM pada setiap periode pelaporan Target Kinerja sampai dengan B08 di tahun 2022, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan berhasil mendapat nilai 100. Data dukung yang diupload telah sesuai dengan action plan.

3) E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui

GRAFIK LAPORAN MONEV BAPPENAS DESEMBER 2022



output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.

Dari tabel tersebut diatas diketahui capaian realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan pada aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah 92,07 % dengan persentase progress pelaksanaan mencapai 77,49%.

4) Kegiatan Prioritas Nasional

Tiga (3) Prioritas Nasional yang dimandatkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2023 yaitu (1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, (2) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (3) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjungpandan akan terus berupaya untuk memenuhi/ melaksanakan 3 (tiga) prioritas nasional tersebut dengan melakukan berbagai kegiatan dan inovasi-inovasi

yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam hal pelayanan publik Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan prima akan selalu diterapkan setiap kali memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasakan dampak perubahan/ penyederhanaan birokrasi yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan. Dalam hal ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan telah berhasil predikat WBK Tahun 2019 dan Predikat WBBM Tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan berkomitmen meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan reformasi birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan menggambarkan tingkat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan selama tahun 2022 yang disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2020-2024.

Seluruh program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan tidak lepas dari komitmen bersama dari pimpinan dan seluruh pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) melalui laporan yang akuntabel dan transparan.

Dalam mencapai akuntabilitas kinerja yang maksimal, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan terus berusaha melaksanakan fungsi dan ketugasan dengan sebaik mungkin dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan secara optimal melalui peran, fungsi dan ketugasan pengelolaan keuangan daerah. Pencapaian kinerja yang ada mungkin belum memuaskan semua pihak, namun demikian kinerja tersebut adalah kinerja terbaik yang dapat kami sajikan dengan segala keterbatasan yang ada. Kondisi ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan dimasa yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan seluruh program tidak terlepas dari pengaruh keadaan, dukungan dan peran serta seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders). Umpan balik (feed back) atas segala yang kami sajikan dan saran-saran sangat kami harapkan guna peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

2. SARAN

Adapun saran-saran guna peningkatan capaian kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengikutsertaan pegawai dalam berbagai kegiatan maupun pendidikan dan pelatihan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Kegiatan pelayanan keimigrasian telah berjalan dengan baik. Diharapkan kedepannya adanya pengembangan inovasi yang dapat membantu meningkatkan pelayanan keimigrasian;
- c. Agar selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui masalah/hambatan yang timbul dalam pencapaian indikator kinerja sehingga dapat mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut;
- d. Mengevaluasi proses dan prosedur operasional terkait dengan efisiensi dan efektivitas birokrasi serta efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi;
- e. Melakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi;

- f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- g. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas penanganan pengaduan masyarakat;
- h. Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan;
- i. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas pembangunan Zona Integritas (ZI).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan tahun 2022 diharapkan dapat menjadi dasar dan bahan evaluasi selama 1 (satu) tahun anggaran guna perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan kedepannya



Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Suyatno

NIP 197901052006041001

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

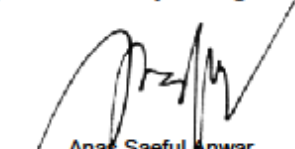
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.003.023.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.003.023.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.129.764.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 5.129.764.000


Pangkalpinang, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung



Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Tanjungpandan



Suyatno
NIP. 197901052006041001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5224658 , Faksimile : (021) 5225035
Laman : www.imigrasi.go.id, Surel : imigrasi@kemenkumham.go.id

Nomor : IMI.1-PW.01.02-001 03 Januari 2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Capaian
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
di seluruh Indonesia

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, bersama ini disampaikan nilai indeks capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bagi Divisi Keimigrasian
 - a. Nilai **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah** diperoleh dengan cara menghitung rerata hasil survei IKM pada aplikasi Survei Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2022 dari seluruh satuan kerja yang ada di wilayah kerja Divisi Keimigrasian masing-masing (Lampiran I);
 - b. Nilai **Indeks Kepuasan Internal (IKI) di Wilayah** diperoleh dengan cara menghitung rerata hasil survei Integritas Internal Organisasi pada aplikasi Survei Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2022 dari seluruh satuan kerja pada aplikasi Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2022 (Lampiran I);
 - c. Nilai **Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah** diperoleh dari hasil rerata Indeks Pengamanan Keimigrasian dari seluruh satuan kerja imigrasi di wilayah kerja masing-masing. Survei dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui *e-Form* mulai dari tanggal 14 November hingga 25 Desember 2022 (Lampiran II);
2. Bagi Satuan Kerja Imigrasi
 - a. Nilai **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah** diperoleh dengan cara menghitung rerata hasil survei IKM Satuan kerja Imigrasi pada aplikasi Survey Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2022 (Lampiran I);
 - b. Nilai **Indeks Kepuasan Internal (IKI)** diperoleh dengan cara menghitung rerata hasil survei Integritas Internal Organisasi pada aplikasi Survei Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2022 dari seluruh satuan kerja pada aplikasi Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2022 (Lampiran I);

- c. Nilai **Indeks Pengamanan Keimigrasian Satuan Kerja** diperoleh dari hasil survei yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui *e-Form* mulai dari tanggal 14 November hingga 25 Desember 2022 (Lampiran II);
3. Detail data nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Internal (menggunakan aplikasi 3AS Balitbangkumham) dan Indeks Pengamanan Keimigrasian (menggunakan *e-Form* Ditjenim) dapat diakses melalui tautan : <https://bit.ly/RekapitulasiCapaianPK2022>.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Supartono

NIP 196706221990031001

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. A r s i p.....

**DAFTAR RERATA NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DAN INDEKS KEPUASAN
 LAYANAN INTERNAL SATUAN KERJA IMIGRASI TAHUN 2022**

KODE SATKER	NAMA SATKER	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		INDEKS KEPUASAN INTERNAL	
		NILAI	RESPONDEN	NILAI	RESPONDEN
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM ACEH	3,92	2499	3,92	2037
408040	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe	3,94	347	3,85	394
408573	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	3,99	368	3,92	575
409026	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa	3,95	427	3,95	357
409032	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh	3,73	392	3,90	218
627323	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	3,98	609	4,00	322
683533	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon	3,91	356	3,88	171
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM BALI	3,94	1891	3,92	6688
408222	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar	3,89	511	3,88	1089
409108	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	3,97	437	3,92	4412
652408	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja	3,97	506	3,97	490
664682	Rudenim Denpasar	3,94	437	4,00	697
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM BANTEN	3,96	1545	3,98	2300
408938	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon	3,96	479	4,00	455
613524	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	3,95	649	3,98	1401
652283	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang	3,98	417	4,00	444
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU	3,87	378	3,82	398
409063	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	3,87	378	3,82	398
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM D.I. YOGYAKARTA	3,90	1104	3,97	737
407995	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	3,90	1104	3,97	737
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA	3,90	7013	3,86	6565
109155	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan	3,88	2016	3,86	1756
407933	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	3,85	694	3,97	759
407942	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	3,89	1232	3,83	1344
408542	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur	3,94	503	3,77	1043
408913	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok	4,00	707	3,92	172
408922	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	3,94	875	3,69	445
652276	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara	3,90	628	3,90	519
664612	Rudenim Jakarta	3,90	358	3,84	527
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM GORONTALO	3,85	389	3,87	458

KODE SATKER	NAMA SATKER	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		INDEKS KEPUASAN INTERNAL	
		NILAI	RESPONDEN	NILAI	RESPONDEN
652429	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo	3,85	389	3,87	458
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAMBI	3,99	1935	3,96	1515
109156	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal	3,99	420	3,98	411
408134	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi	4,00	400	3,95	741
418935	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci	3,98	1115	3,95	363
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT	3,98	5588	3,97	5438
408627	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur	3,96	1286	3,97	102
407958	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	3,98	399	3,99	970
407964	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon	3,99	634	4,00	704
408463	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor	3,98	387	3,95	1025
498382	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok	4,00	731	4,00	897
652297	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi	4,00	489	3,97	466
652302	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang	3,98	385	3,95	537
652319	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya	3,96	872	3,98	392
683039	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi	3,99	405	3,88	345
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH	3,97	5118	3,95	4266
407973	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	3,91	452	3,99	748
407989	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap	4,00	2359	3,92	621
408944	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	3,99	447	3,87	1062
652323	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemasang	4,00	388	3,98	560
652340	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo	3,90	584	3,99	428
652344	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati	3,95	446	3,96	410
664629	Rudenim Semarang	3,96	442	4,00	437
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TIMUR	3,93	7629	3,91	6965
408009	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	3,92	568	3,92	2245
408015	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	3,99	916	3,97	933
408021	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember	3,90	381	3,90	510
408953	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	3,94	880	3,88	592
652365	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun	3,95	2449	3,96	477
652372	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar	3,88	485	3,81	545
664633	Rudenim Surabaya	3,82	337	3,77	420
683458	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan	3,89	449	3,95	307
683462	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri	3,85	365	3,93	471
684006	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo	4,00	799	3,96	465
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN BARAT	3,92	4124	3,92	4931
408171	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak	3,97	363	3,96	1146
408190	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang	3,96	502	3,94	659

KODE SATKER	NAMA SATKER	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		INDEKS KEPUASAN INTERNAL	
		NILAI	RESPONDEN	NILAI	RESPONDEN
409145	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau	3,81	401	3,89	425
418936	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang	3,98	696	3,92	456
539101	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong	3,90	978	3,83	459
662967	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas	3,96	573	3,98	659
664650	Rudenim Pontianak	3,94	328	3,91	831
686574	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Putussibau	3,82	283	3,87	296
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN SELATAN	3,90	839	3,79	946
109158	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin	3,96	401	3,86	388
408598	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin	3,85	438	3,73	558
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN TENGAH	3,93	850	3,84	867
408448	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangkaraya	3,91	425	3,88	416
409072	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit	3,95	425	3,81	451
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN TIMUR	3,96	3192	3,93	3219
408196	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	3,95	581	4,00	683
408210	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan	3,97	504	3,91	508
408479	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	3,98	485	3,85	667
409088	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan	3,97	630	3,96	805
664654	Rudenim Balikpapan	3,96	484	3,94	388
679991	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb	3,91	508	3,77	168
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3,99	820	3,96	1076
109160	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan	4,00	423	3,96	399
408159	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang	3,99	397	3,95	677
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN RIAU	3,66	4134	3,93	4535
109161	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkap	3,96	568	3,94	683
408103	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang	3,98	546	3,98	508
408112	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun	3,98	382	3,99	667
408128	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang	3,99	402	3,99	805
408624	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	3,93	536	3,91	388
409020	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa	3,96	394	3,98	168
409041	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban	3,93	486	3,97	399
409057	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai	3,96	409	3,94	677
677181	Rudenim Pusat Tanjung Pinang	3,96	411	3,87	240

KODE SATKER	NAMA SATKER	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		INDEKS KEPUASAN INTERNAL	
		NILAI	RESPONDEN	NILAI	RESPONDEN
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG	3,96	1231	3,96	1148
109157	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda	3,95	437	3,95	230
408165	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	3,94	460	3,95	767
683111	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kota Bumi	4,00	334	4,00	151
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU	3,87	703	3,76	1050
408602	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon	3,84	350	3,70	600
662952	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual	3,91	353	3,82	450
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA	3,97	1992	3,97	846
480505	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate	3,92	429	3,99	582
662968	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo	3,98	1563	3,95	264
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM NTB	3,86	1234	3,82	1439
652412	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar	3,97	533	3,94	357
408247	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram	3,82	340	3,81	857
418938	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima	3,75	361	3,66	225
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM NTT	3,87	1666	3,82	3433
408231	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang	3,91	466	3,91	672
409114	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua	3,81	322	3,74	1337
409123	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere	3,90	129	3,96	320
664696	Rudenim Kupang	3,85	346	3,86	760
683547	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo	3,86	403	3,76	344
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA	3,84	1464	3,78	1786
109159	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika	3,90	354	3,88	426
408253	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura	3,81	206	3,67	319
408262	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak	3,74	351	3,62	314
408284	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke	3,97	273	3,93	356
664701	Rudenim Jayapura	3,79	280	3,74	371
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT	3,92	493	3,86	793
408278	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong	3,96	274	3,82	484
498398	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari	3,87	219	3,94	309
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM RIAU	3,98	4389	3,95	3148
408061	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru	3,96	652	3,99	843
408077	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis	3,99	1022	3,92	249
408083	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai	3,99	773	3,93	496

KODE SATKER	NAMA SATKER	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		INDEKS KEPUASAN INTERNAL	
		NILAI	RESPONDEN	NILAI	RESPONDEN
408092	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagan Siapiapi	4,00	520	4,00	173
408485	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan	3,97	390	3,83	307
408511	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang	3,96	344	3,89	164
664544	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak	3,99	432	3,95	291
664593	Rudenim Pekanbaru	3,93	256	3,97	625
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI BARAT	3,90	693	3,78	462
498402	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar	3,95	382	3,82	362
498418	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju	3,83	311	3,64	100
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI SELATAN	3,93	5197	3,84	2633
408216	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	3,97	2997	3,82	1327
409001	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare	3,98	794	3,97	453
418937	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo	3,84	1140	3,74	417
664675	Rudenim Makassar	3,86	266	3,83	436
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGAH	3,96	831	3,88	860
408423	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu	3,96	383	3,87	653
686570	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai	3,97	448	3,89	207
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGGARA	3,91	1312	3,96	1095
409002	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari	3,89	496	3,99	713
686549	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi	3,92	380	3,93	129
686553	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bau-Bau	3,92	436	3,92	253
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI UTARA	3,98	1684	3,91	2303
408618	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado	3,94	320	3,88	762
409094	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung	3,98	349	3,93	344
664572	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna	3,99	131	3,96	172
664661	Rudenim Manado	3,99	526	3,97	748
686532	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu	3,98	358	3,79	277
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA BARAT	3,95	907	3,80	1260
408582	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang	3,96	498	3,73	777
652393	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam	3,95	409	3,90	483
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN	3,97	2869	3,97	1252
408143	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	3,95	1009	3,96	875
664565	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim	3,97	1860	4,00	377
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA UTARA	3,98	6262	3,92	5362
408046	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	3,98	2077	3,89	2541

KODE SATKER	NAMA SATKER	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		INDEKS KEPUASAN INTERNAL	
		NILAI	RESPONDEN	NILAI	RESPONDEN
408052	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Siantar	4,00	753	3,97	434
408491	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	3,95	1023	3,99	376
408969	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia	4,00	811	3,98	613
408975	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	3,95	803	3,95	397
408981	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	3,99	411	3,83	397
664586	Rudenim Medan	3,97	384	3,98	604

Grade*	Keterangan	Indeks
A	Sangat Baik	3,600 – 4,000
B	Baik	3,065 – 3,599
C	Kurang Baik	2,600 – 3,064
D	Tidak Baik	1,000 – 2,599

**DAFTAR NILAI INDEKS PENGAMANAN KEIMIGRASIAN WILAYAH DAN SATUAN
 KERJA IMIGRASI TAHUN 2022**

KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH RESPONDEN	NILAI IPK
		TOTAL	IPK
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM ACEH	67	3,77
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM ACEH	9	3,77
408040	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe	1	3,88
408573	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	14	3,68
409026	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa	12	3,82
409032	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh	6	3,69
627323	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	12	3,98
683533	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon	13	3,68
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM BALI	68	3,81
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM BALI	9	3,78
408222	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar	3	3,52
409108	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	44	3,82
652408	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja	7	3,77
664682	Rudenim Denpasar	5	4,00
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM BANTEN	65	3,82
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM BANTEN	13	3,95
408938	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon	3	3,81
613524	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	34	3,71
652283	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang	15	3,97
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU	21	3,72
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU	10	3,79
409063	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	11	3,65
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM D.I YOGYAKARTA	43	3,94
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM D.I. YOGYAKARTA	16	3,94
407995	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	27	3,94
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA	228	3,70
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA	29	3,85
109155	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan	13	3,82
407933	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	4	4,00
407942	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	16	3,70
408542	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur	10	3,57
408913	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok	26	3,87
408922	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	59	3,63
652276	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara	15	3,47
664612	Rudenim Jakarta	56	3,65
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM GORONTALO	49	3,60
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM GORONTALO	25	3,57

KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH RESPONDEN	NILAI IPK
		TOTAL	IPK
652429	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo	24	3,64
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM JAMBI	44	3,87
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAMBI	11	3,90
109156	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal	9	3,97
408134	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi	9	3,93
418935	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci	15	3,76
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT	223	3,77
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT	15	3,78
408627	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur	15	3,87
407958	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	25	3,88
407964	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon	24	3,65
408463	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor	22	3,71
498382	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok	21	3,61
652297	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi	44	3,96
652302	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang	24	3,60
652319	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya	6	3,61
683039	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi	27	3,77
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH	208	3,77
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH	18	3,67
407973	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	38	3,79
407989	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap	26	3,75
408944	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	28	3,79
652323	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pematang	26	3,88
652340	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo	18	3,66
652344	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati	21	3,51
664629	Rudenim Semarang	33	3,94
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TIMUR	217	3,77
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TIMUR	15	3,50
408009	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	40	3,72
408015	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	25	3,93
408021	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember	22	3,67
408953	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	15	3,92
652365	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun	20	3,78
652372	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar	13	3,88
664633	Rudenim Surabaya	27	3,76
683458	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan	13	3,62
683462	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri	3	3,41
684006	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo	24	3,94
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN BARAT	150	3,72
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN BARAT	11	3,77
408171	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak	11	3,97

KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH RESPONDEN	NILAI IPK
		TOTAL	IPK
408190	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang	34	3,84
409145	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau	13	3,61
418936	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang	20	3,60
539101	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong	5	3,68
662967	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas	10	3,85
664650	Rudenim Pontianak	31	3,66
686574	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Putussibau	15	3,54
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN SELATAN	59	3,68
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN SELATAN	19	3,79
109158	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin	18	3,71
408598	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin	22	3,56
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN TENGAH	40	3,68
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN TENGAH	14	3,69
408448	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangkaraya	14	3,67
409072	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit	12	3,69
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN TIMUR	86	3,78
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN TIMUR	8	3,65
408196	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	22	3,80
408210	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan	13	3,72
408479	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	16	3,72
409088	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan	19	3,92
664654	Rudenim Balikpapan	7	3,79
679991	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb	1	3,20
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	51	3,85
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	12	3,87
109160	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan	22	3,90
408159	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang	17	3,79
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN RIAU	237	3,76
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN RIAU	12	3,93
109161	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkap	16	3,64
408103	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang	22	3,92
408112	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun	16	3,80
408128	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang	15	3,83
408624	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	30	3,84
409020	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa	34	3,72
409041	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban	26	3,72
409057	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai	16	3,58

KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH RESPONDEN	NILAI IPK
		TOTAL	IPK
677181	Rudenim Pusat Tanjung Pinang	50	3,72
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG	60	3,77
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG	16	3,73
109157	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda	12	3,49
408165	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	14	4,00
683111	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kota Bumi	18	3,81
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU	110	3,59
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU	16	3,62
408602	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon	73	3,51
662952	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual	21	3,86
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM MALUTU UTARA	36	3,81
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA	15	3,76
480505	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate	8	3,88
662968	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo	13	3,83
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM NTB	51	3,88
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM NTB	6	4,00
652412	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar	12	3,69
408247	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram	22	3,97
418938	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima	11	3,82
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM NTT	129	3,56
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM NTT	11	3,43
408231	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang	28	3,58
409114	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua	28	3,57
409123	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere	29	3,59
664696	Rudenim Kupang	17	3,52
683547	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo	16	3,63
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA	71	3,58
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA	5	3,58
109159	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika	6	3,85
408253	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura	16	3,51
408262	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak	24	3,41
408284	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke	11	3,82
664701	Rudenim Jayapura	9	3,67
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT	44	3,56
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT	16	3,55
408278	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong	16	3,43
498398	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari	12	3,75
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM RIAU	158	3,75
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM RIAU	17	3,46

KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH RESPONDEN	NILAI IPK
		TOTAL	IPK
408061	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru	11	3,73
408077	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis	17	3,77
408083	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai	13	3,78
408092	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagan Siapiapi	16	3,73
408485	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan	26	3,79
408511	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang	14	3,90
664544	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak	15	3,68
664593	Rudenim Pekanbaru	29	3,85
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI BARAT	45	3,71
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI BARAT	11	3,71
498402	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar	19	3,71
498418	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju	15	3,71
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI SELATAN	102	3,61
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI SELATAN	14	3,87
408216	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	27	3,56
409001	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare	15	3,77
418937	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo	39	3,51
664675	Rudenim Makassar	7	3,47
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGAH	34	3,77
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGAH	9	3,71
408423	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu	13	3,82
686570	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai	12	3,75
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGGARA	57	3,72
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGGARA	15	3,77
409002	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari	16	3,92
686549	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi	8	3,21
686553	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bau-Bau	18	3,74
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI UTARA	129	3,72
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI UTARA	20	3,77
408618	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado	29	3,66
409094	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung	18	3,87
664572	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna	12	3,66
664661	Rudenim Manado	38	3,79
686532	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu	12	3,43
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA BARAT	44	3,71

KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH RESPONDEN	NILAI IPK
		TOTAL	IPK
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA BARAT	9	3,62
408582	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang	17	3,65
652393	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam	18	3,82
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN	50	3,76
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN	11	3,54
408143	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	23	3,88
664565	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim	16	3,74
	IPK KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA UTARA	149	3,76
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA UTARA	15	3,88
408046	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	40	3,63
408052	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Siantar	18	3,84
408491	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	11	3,86
408969	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia	17	3,79
408975	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	11	3,80
408981	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	15	3,82
664586	Rudenim Medan	22	3,72

Grade*	Keterangan	Indeks
A	Sangat Baik	3,600 – 4,000
B	Baik	3,065 – 3,599
C	Kurang Baik	2,600 – 3,064
D	Tidak Baik	1,000 – 2,599